

SKRIPSI

**GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA
DI DESA LAMPOKO KECAMATAN CAMPALAGIAN
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**



Oleh

HASRIANI

F01 17517

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT MAJENE**

2022/2023

ABSTRAK

Kepemimpinan kepala desa merupakan salah satu aspek yang menonjol dan berpengaruh terhadap kemajuan sebuah desa, karena tugas seorang pemimpin adalah mempengaruhi perilaku bawahan agar mau bekerja sama dan bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Gaya kepemimpinan dapat terwujud dengan adanya kerjasama yang baik antara pemimpin dengan bawahan. Dan seorang pemimpin tidak bisa membangun organisasinya tanpa seorang bawahan. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Lampoko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian dengan tingkat esplansi deskriptif dan analisis data kualitatif. Informan peneliti adalah perangkat desa dan masyarakat. Metode pengumpulan data ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan teknik analisis ini peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa gaya kepemimpinan kepala Desa Lampoko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar berada pada Gaya Kepemimpinan Demokratik. Selanjutnya penyajian data menggunakan pendekatan deskriptif. Proses pengumpulan data dilakukan di kantor Desa Lampoko, dengan melakukan wawancara kepada empat dari bagian kantor Desa Lampoko. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh Kepala Desa dengan indikator keputusan dibuat bersama, menghargai potensi bawahan, mendengarkan kritik, saran dan pendapat dari pegawai, dan melakukan kerjasama dengan bawahannya. Dapat dikategorikan bahwa Kepala Desa Lampoko

menggunakan gaya kepemimpinan Demokratik dan dengan tipe kepemimpinan yang aktif, dinamis, terarah, dan bertanggung jawab.

Kata kunci : Gaya, Kepemimpinan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dengan berlakunya Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebabkan perubahan dalam tatanan pemerintahan Negara Republik Indonesia, dimana untuk menyelenggarakan pemerintahan di desa di bentuk pemerintah desa yang berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut azas otonomi. Pemberian otonomi kepada desa diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Pemerintah Desa merupakan bentuk formal dari kesatuan masyarakat desa. Dalam Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang- Undang Desa dijelaskan bahwa Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Kepala desa sebagai seorang pemimpin di lingkup desa memiliki aspek-aspek kepribadian khas/gaya kepemimpinan yang dapat menunjang usahanya dalam mewujudkan hubungan yang baik dengan aparat dan anggota masyarakatnya. Kesuksesan atau kegagalan suatu organisasi ditentukan oleh banyak hal, yang salah satunya adalah kepemimpinan yang berjalan dalam organisasi tersebut. Pemimpin yang sukses apabila pemimpin tersebut mampu menjadi pencipta dan penggerak bagi bawahannya dengan menciptakan suasana

kerja yang dapat memacu pertumbuhan dan mampu mengembangkan anggotanya serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pada struktur organisasi, seorang kepala desa di bantu oleh sekretaris desa dimana gaya kepemimpinan yang diterapkan seorang pemimpin dapat mempengaruhi partisipasi pegawai dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Selain itu gaya kepemimpinan sebagai peran penting dalam setiap organisasi atau lembaga karena setiap lembaga mempunyai masing-masing pemimpin. Salah satu pemimpin yang mampu menjadi penggerak bagi bawahannya yaitu kepala desa di Desa Lampoko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar, karena dari hasil penelitian bahwa Kepala Desa Lampoko tersebut mencontohkan kepada perangkatnya untuk datang ke balai desa lebih awal yaitu pukul 07.00 WIB, supaya perangkat desa datang tepat waktu. Kemudian kegiatan yang dilakukan sharing dengan perangkat tentang kegiatan yang belum terlaksana dan merencanakan kegiatan yang akan dilakukan selanjutnya.

Syarat untuk menjadi kepala desa di haruskan untuk memiliki Ijazah berpendidikan paling rendah tamat SLTP dan/atau sederajat. Kepala desa di Desa Lampoko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar, merupakan kepala desa yang memiliki ijazah S1 namun memiliki inovasi, motivasi dan semangat dan harapan yang tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Desa Lampoko merupakan salah satu desa dari Kecamatan Campalagian yang memiliki kategori desa swadaya. Hal ini berdasarkan data dari BPS (Badan Pusat Statistik) Tahun 2021. Desa ini bersifat sedenter, artinya sudah ada

kelompok keluarga yang bermukim secara menetap di sana. Tipe atau bentuk desa yang berada pada tingkat yang lebih baik disebut swadaya.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, kepala desa melakukan kegiatan Rapat Rutin yang di laksanakan setiap jadwal ditentukan. Saat kepala desa memimpin rapat mengenai agenda desa. Kepala desa memberikan kesempatan untuk berpendapat kepada perangkat desa dan tokoh masyarakat sebagai bentuk partisipasi di dalam rapat, hal tersebut ditunjukkan dengan cara mengusulkan pendapat kemudian perangkat desa beserta beberapa tokoh masyarakat mengevaluasi hasil keputusan kepala desa dan kegiatan yang terlaksana. Semua di musyawarahkan dalam forum, sehingga hasil rapat tersebut merupakan hasil keputusan bersama yang dipertanggung jawabkan oleh kepala desa.

Adanya partisipasi perangkat desa dan masyarakat di Desa Lampoko dapat terlaksana jika kepala desanya dapat mempengaruhi untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Fenomena yang terjadi di lapangan adalah Desa Lampoko dikatakan sebagai desa maju (data observasi, 2021) karena meskipun desa tersebut memiliki Tanah Kas Desa (TKD), namun Desa Lampoko mampu juga memberdayakan masyarakatnya untuk memajukan desanya. Oleh karena itu penerapan suatu gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh kepala desa akan berpengaruh terhadap tujuan pemerintahan dalam upaya penyelenggaraan pemerintah desa.

Berbagai bentuk capaian yang telah diraih Desa Lampoko ditentukan oleh gaya kepemimpinan kepala desa. Kepala Desa Lampoko tidak hanya sekedar memberi arahan kepada warganya untuk melaksanakan kegiatan, beliau juga

selalu mendengarkan atau memberi kesempatan kepada bawahan dan warganya untuk memberi saran, pendapat atau bahkan kritik dalam kegiatan pemerintahan yang akan maupun yang telah dilaksanakan di desanya. Kepala Desa Lampoko selalu mendengarkan aspirasi mereka melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Pada hakikatnya pengikut (bawahan) memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan dalam mencapai tujuan. Hal ini akan memberikan pilihan situasi bagi pemimpin yakni kepala desa dalam berkomunikasi dengan bawahan, menerima pendapat bawahan, dan memberikan wewenang.

Kepemimpinan merupakan tulang punggung pengembangan organisasi, karena tanpa kepemimpinan yang baik akan sulit untuk mencapai tujuan organisasi. Jika seorang pemimpin mampu untuk mempengaruhi perilaku individu yang lain maka pemimpin tersebut tentu memiliki gaya kepemimpinan yang baik. Gaya kepemimpinan kepala desa di Desa Lampoko Kecamatan Campalagian di mulai sejak tahun 2017 melalui pemilihan kepala desa serentak. Berikut merupakan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lampoko yang disajikan pada :

Tabel 1.1 Realisasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa Lampoko

NO	Bidang	Terlaksananya Kegiatan	
		Ya	Tidak
1			
2	Penetapan dan Penegasan Kebijakan Desa	√	
3	Pendataan dan Pengarsipan Desa	√	
4	Penyusunan tata ruang desa		√
5	Pengelolaan Pengembangan Informasi Desa	√	
6	Penyelenggaraan Musyawarah Desa	√	
7	Penyelenggaraan perencanaan Desa	√	
8	Penyelenggaraan evaluasi desa	√	
9	Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintah desa	√	

10	Penyelenggaraan kerjasama antar Desa	√	
11	Pembentukan dan peningkatan kapasitas BPD	√	
12	Pengelolaan dan Penyelenggaraan pemerintah desa	√	
13	Operasional pemerintah desa	√	

Sumber : Data desa dalam capaian kegiatan/2021

Pada Tabel 1.1 dapat diketahui dari tiga belas bidang kegiatan yang direncanakan sebanyak duabelas bidang kegiatan telah terlaksana. Hal ini dikarenakan adanya partisipasi aparat dan warga Desa Lampoko atas pengaruh kepemimpinan kepala desa, karena kepala desa merupakan unsur pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat.

Kepemimpinan kepala desa sangatlah dibutuhkan untuk dapat menyukseskan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Trisantono (2011:185) Kepala desa mempunyai tugas penyelenggaraan desa yaitu: a) Urusan pemerintahan, antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti, pembuatan peraturan deaa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan badan usaha milik daerah, dan kerja sama antar desa; b) Urusan pembangunan, antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum desa seperti jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pasar desa; c) Urusan kemasyarakatan, yang meliputi pemberdayaan Masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat, seperti bidang kesehatan, pendidikan serta adat istiadat.

Kepala desa merupakan suatu konsep terapan kepemimpinan yang diterapkan dalam pemerintahan desa. Seorang kepala desa harus bisa menjalankan dua peran, yaitu kepala desa harus bisa mengintegrasikan sebagai seorang pemimpin formal pemerintahan desa yang juga kepanjangan tangan dari

pemerintah dan sebagai pemimpin sosial kemasyarakatan yang bisa menyambut dan menjadi saluran aspirasi masyarakat yang dipimpinnya.

Gaya kepemimpinan kepala desa erat hubungannya dengan tujuan yang hendak dicapai oleh suatu pemerintahan desa, oleh karena itu, gaya kepemimpinan kepala desa selalu dihubungkan dengan kegiatan kepala desa dalam mengarahkan, memotivasi, berkomunikasi, pengambilan keputusan, dan pengawasan anggoranya untuk mewujudkan tujuan pemerintahan desa.

Gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain atau bawahan. Gaya kepemimpinan mempunyai peranan yang sangat penting dalam mencapai efektifitas kerja. Jika seorang pemimpin mampu menerapkan gaya kepemimpinan yang tepat dan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada maka bawahan pun akan dapat bekerja dengan nyaman dan semangat yang tinggi.

Keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas dan fungsi ditentukan oleh kemampuan dalam memainkan gaya kepemimpinan yang efektif di lingkungan desa. Organisasi dalam penelitian ini adalah Desa Lampoko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar. Kepala desa sebagai pemimpin di desa Lampoko tidak terlepas dari berbagai gaya kepemimpinan. Dengan berbagai gaya tersebut kepala desa dapat mempengaruhi apatur desa dan masyarakat untuk menjalankan roda pemerintahan desa.

Berdasarkan beberapa alasan tersebut, maka masalah pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah bagaimana gaya kepemimpinan kepala desa Lampoko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar. Berknaan dengan gaya

kepemimpinan kepala desa di Lampoko, penulis mendapati beberapa permasalahan, diantaranya:

1. Kepala desa terkesan tidak adil dalam memperlakukan masyarakat di desa, hal ini dapat dilihat dari sikap kepala desa yang cenderung lebih mendahulukan masyarakat yang berada disekitar tempat tinggalnya dibandingkan dengan masyarakat desa lainnya;
2. Kepala desa terkesan membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, atau pihak tertentu, hal ini dapat dilihat dari sikap kepala desa yang apabila ada yang acuh dengan masyarakat lainnya.

Melihat dari fenomena dan permasalahan yang terjadi di Desa Lampoko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar tentang gaya kepemimpinan kepala desa, timbul keinginan penulis untuk meneliti dengan mengangkat judul penelitian **“Gaya Kepemimpinan Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Desa Lampoko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berangkat dari definisi tentang masalah penelitian tersebut, peneliti menemukan suatu permasalahan **“Bagaimana Gaya Kepemimpinan Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Desa Lampoko Kecamatan Campalagian?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berkaitan erat dengan penelitian yang telah dirumuskan dan kemudian menyampaikan hasil-hasil yang hendak dicapai dan tidak boleh menyimpang dari permasalahan, maka bisa disimpulkan bahwa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk *mendeskrripsikan dan menganalisis Gaya Kepemimpinan Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Desa Lampoko Kecamatan Campalagian.*

1.4 Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian dilaksanakan dalam upaya untuk menjawab masalah penelitian yang mana jika jawaban atas pertanyaan tersebut tercapai dan mampu memberikan manfaat terhadap lingkungan penelitian maupun bagi bahasan penelitian yang terkait. Adapun manfaat penelitian yang ingin diperoleh oleh peneliti adalah sebagai berikut.

1.4.1 Secara Praktis

Dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pihak terkait.

1.4.2 Secara Akademis

Dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu administrasi negara yang bersifat teori maupun praktik mengenai Gaya Kepemimpinan Kepala Desa dan juga memberikan pengetahuan dan membantu peneliti untuk belajar membuat karya ilmiah terkait Kepemimpinan. Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana S.IP.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu/Tinjauan Empirik

Hasil penelitian yang relevan digunakan peneliti untuk menghindari pengulangan kajian akan hal-hal yang dianggap sama. Berikut adalah penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan :

1. Skripsi yang berjudul “Gaya Kepemimpinan Kepala Desa (Studi Kasus Kepemimpinan Empat Kelurahan di Kecamatan Sewon Bantul Yogyakarta)” oleh Tri Hidayati. Universitas Islam Indonesia Fakultas Ekonomi Yogyakarta, 2018. Dimana penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan empat kepala desa yang memimpin di empat kelurahan yang memiliki pengembangan diri serta proses yang berbeda dalam menerapkan gaya kepemimpinan yang ada di masing-masing kelurahannya. Gaya kepemimpinan yang diterapkan tersebut dipengaruhi oleh pembentukan dan pengembangan individu yang diperoleh dari proses sebelum menjadi pemimpin yaitu karakter individu yang kemudian diterapkan setelah menjadi seorang pemimpin.

Persamaan dalam penelitian ini sama-sama meneliti tentang gaya kepemimpinan kepala desa. Perbedaannya dari penelitian ini yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Tri Hidayati fokus pada 4 kelurahan dan 4 kepala Desa yang ada di kecamatan Sewon didasarkan pada 5 sisi yaitu karakteristik, perilaku, sifat, latar belakang dan gaya kepemimpinan kepala

desa kecamatan Sewon sedangkan pada penelitian ini fokus pada satu desa pada kepala desa Karangkuten Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto berdasarkan karakteristik gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh kepala desa Karangkuten.

2. Jurnal yang berjudul “Gaya Kepemimpinan Kepala Desa dalam Menggerakkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa” ditulis oleh Sartono dan La Manguntara, Universitas Halu Oleo Kendari 2018. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara umum gaya kepemimpinan kepala desa Latungo terdiri dari lima aspek yaitu konsultasi, keputusan bersama, pembagian kekuasaan, desentralisasi dan manajemen demokrasi. Partisipasi masyarakat desa Latugho cukup baik dimana terlihat dari partisipasi masyarakat saat melakukan perencanaan yang mana masyarakat sangat menunjukkan antusias yang tinggi, tetapi tidak diimbangi pengajuan ide-ide saat ikut rapat yang selanjutnya partisipasi masyarakat tersebut tergolong dalam partisipasi materi dan partisipasi secara tenaga masih tergolong sangat rendah. Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang gaya kepemimpinan kepala desa. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu dalam penelitian yang dilakukan oleh Sartono dan La Manguntara yaitu tentang deskripsi gaya kepemimpinan kepala desa dan partisipasi masyarakat sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan yaitu mendeskripsikan bagaimana gaya kepemimpinan kepala desa berdasarkan visi misi yang telah dibuat oleh kepala desa dan potensi yang ada di desa.

3. Skripsi yang berjudul “Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Desa terhadap Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Desa ditinjau dari Ekonomi Islam” 2017 Oleh Galih Aisia Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa kepemimpinan merupakan faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi partisipasi masyarakat, karena baik buruknya partisipasi masyarakat bergantung pada pemimpinnya. Dengan Rumusan masalah bagaimana gaya kepemimpinan kepala desa dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan kepala desa berpengaruh secara signifikan terhadap partisipasi masyarakat yang mana kepala desa di Kampung Sri Pendowo dan Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah menggunakan Gaya kepemimpinan yang demokratis. Dimana gaya ini dianggap sangat efektif dalam membangun partisipasi masyarakat untuk membangun desa. Selain itu gaya ini memenuhi prinsip-prinsip yang sesuai dengan kepemimpinan dalam islam yaitu amanah, adil dan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang gaya kepemimpinan kepala desa dalam partisipasi masyarakat. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu dalam penelitian yang dilakukan oleh Galih Aisia ini meninjau gaya kepemimpinan berdasarkan ekonomi islam. Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan yaitu didasarkan pada gaya kepemimpinan dalam

keikutsertaan masyarakat dilihat dari peran kepala desa dalam menggerakkan masyarakat.

4. Skripsi yang berjudul “Gaya Kepemimpinan Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pembangunan (Studi Gaya Kepemimpinan di Desa Maron Kulon Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo)” oleh Multazam Fadli Masruhin Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Tahun 2015. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui fakta-fakta tentang gaya kepemimpinan kepala desa dalam penyelenggaraan pembangunan di desa Maron Kulon Kecamatan Maro Kabupaten Probolinggo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan menggunakan tipe pendekatan studi kasus yaitu penelitian yang mengungkapkan fakta apa adanya tentang suatu obyek, gejala maupun keadaan dengan menggambarkan atau menguraikan, dan menginterpretasikannya kedalam suatu bentuk tulisan yang sistematis. Hasil penelitian ini yaitu didapatkan kesimpulan bahwa gaya kepemimpinan yang digunakan oleh kepala Desa Maron Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo yaitu gaya kepemimpinan yang demokratis. Proses penyelenggaraan pembangunan tersebut dilakukan kepala desa tidak bersifat otoriter tetapi kepala desa mengumpulkan terlebih dahulu orang-orang yang terlibat dalam proses pembangunan tersebut, kemudian diadakanlah rapat yang pada akhirnya ditentukan sebuah keputusan yang disetujui bersama.

Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang gaya kepemimpinan kepala desa.

Perbedaannya yaitu pada penelitian Multazam yaitu lebih fokus pada bagaimana gaya kepemimpinan kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan namun dalam penelitian ini yaitu lebih fokus pada bagaimana gaya kepemimpinan kepala desa dan perannya dalam peningkatan partisipasi masyarakat.

5. Skripsi yang berjudul “Kepemimpinan Kepala Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Perempuan pada Pemerintahan Desa (Studi pada Desa Jaya Sakti Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah)” oleh Mia Arta Oktavia Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung Tahun 2018. Penelitian ini berawal dari rendahnya partisipasi perempuan di desa terutama pada pemerintahan desa di Indonesia yang salah satunya disebabkan oleh kurangnya dukungan dan kesadaran masyarakat bahwa partisipasi perempuan merupakan bentuk pengarusutamaan gender. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepala Kampung Jaya Sakti Berperan dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam pada pemerintahan di Kampung Jaya Sakti. Perempuan di Kampung Jaya Sakti juga memiliki kesadaran diri untuk mau berpartisipasi aktif dalam pemerintahan desa. Akan tetapi Kepala Kampung belum dapat menjelaskan bagaimana pentingnya partisipasi perempuan. Kepala Kampung sebagai pemimpin seharusnya dapat menegaskan kepada masyarakat terutama kaum perempuan tentang pentingnya partisipasi

masyarakat untuk kemajuan kampung dalam hal pengarusutamaan gender ditingkat desa.

Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang partisipasi masyarakat.

Perbedaannya yaitu dalam penelitian yang dilakukan oleh Mia ini menjelaskan tentang kepemimpinan kepala desa dalam peningkatan partisipasi perempuan tetapi dalam penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana gaya kepemimpinan dalam peningkatan partisipasi masyarakat desa secara umum bukan berdasarkan pada perbedaan gender.

6. Skripsi yang berjudul “Gaya Kepemimpinan Kepala Desa dan Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan (Desa Waringin Jaya, Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor)” yang disusun oleh Fauzan Ahmad Milad Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor Tahun 2016. Penelitian ini diawali karena kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa menunjukkan bahwa pembangunan desa belum mencerminkan pembangunan yang partisipatif. Kondisi ini memerlukan dukungan kepemimpinan, yakni kepala desa sebagai figur pemimpin untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara gaya kepemimpinan kepala desa dominan dengan tingkat partisipasi masyarakat, menganalisis hubungan antara faktor internal dengan tingkat partisipasi masyarakat, dan menganalisis hubungan antara faktor eksternal dengan tingkat partisipasi masyarakat. Penelitian ini

berlokasi di Desa Waringin Jaya, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor.

Tabel. 1.2 Penelitian Terdahulu/Tinjauan Empirik

No	Penulis/Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan
1	Gaya Kepemimpinan Kepala Desa (Studi Kasus Kepemimpinan Empat Kelurahan di Kecamatan Sewon Bantul Yogyakarta)” oleh Tri Hidayati.	Gaya Kepemimpinan Kepala Desa	Gaya kepemimpinan yang diterapkan tersebut dipengaruhi oleh pembentukan dan pengembangan individu yang diperoleh dari proses sebelum menjadi pemimpin yaitu karakter individu yang kemudian diterapkan setelah menjadi seorang pemimpin.	Persamaan dalam penelitian ini sama-sama meneliti tentang gaya kepemimpinan kepala desa.
2	Gaya Kepemimpinan Kepala Desa dalam Menggerakkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa” ditulis oleh Sartono dan La Manguntara, Universitas Halu Oleo Kendari 2018.	Gaya Kepemimpinan Kepala Desa dalam Menggerakkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara umum gaya kepemimpinan kepala desa Latungo terdiri dari lima aspek yaitu konsultasi, keputusan bersama, pembagian kekuasaan, desentralisasi dan manajemen demokrasi.	Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang gaya kepemimpinan kepala desa
	Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Desa terhadap Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Desa ditinjau dari Ekonomi Islam” 2017 Oleh Galih Aisia	Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Desa terhadap Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Desa	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan kepala desa berpengaruh secara signifikan terhadap partisipasi masyarakat yang mana kepala desa di Kampung Sri Pendowo dan Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah menggunakan Gaya kepemimpinan yang demokratis.	Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang gaya kepemimpinan kepala desa dalam partisipasi masyarakat.

4	Gaya Kepemimpinan Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pembangunan (oleh Multazam Fadli Masruhin	Gaya Kepemimpinan Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pembangunan	Hasil penelitian ini yaitu didapatkan kesimpulan bahwa gaya kepemimpinan yang digunakan oleh kepala Desa Maron Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo yaitu gaya kepemimpinan yang demokratis.	Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang gaya kepemimpinan kepala desa.
5	Kepemimpinan Kepala Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Perempuan pada Pemerintahan Desa (Studi pada Kampung Jaya Sakti Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah)” oleh Mia Arta Oktavia	Kepemimpinan Kepala Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Perempuan pada Pemerintahan Desa	penelitian ini menunjukkan bahwa Kepala Kampung Jaya Sakti Berperan dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam pada pemerintahan di Kampung Jaya Sakti. Perempuan di Kampung Jaya Sakti juga memiliki kesadaran diri untuk mau berpartisipasi aktif dalam pemerintahan desa.	Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang partisipasi masyarakat.

2.2 Konsep Kepemimpinan

2.2.1 Defenisi Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah aktivitas mempengaruhi orang lain agar dapat bekerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh pemimpin. Pemimpin adalah orang yang melaksanakan kepemimpinan. Kepemimpinan merujuk pada proses, kegiatan, sedang pemimpin merujuk pada kepribadian seseorang.

Definisi kepemimpinan menurut para ahli adalah sebagai berikut: Menurut House dalam Gary Yukl (2009:4) mengatakan Kepemimpinan adalah kemampuan individu untuk mempengaruhi, memotivasi, dan membuat orang lain mampu memberikan kontribusinya demi efektivitas dan keberhasilan organisasi. Jadi dari pendapat House dapat dikatakan bahwa kepemimpinan

merupakan cara mempengaruhi dan memotivasi orang lain agar orang tersebut mau berkontribusi untuk keberhasilan organisasi.

Sedangkan Terry dalam Wahjosumidjo (1994:25) menyatakan bahwa “Leadership is the activity of influencing exercised to strive willingly for group objectives” (Kepemimpinan adalah kegiatan dalam mempengaruhi orang lain untuk bekerja keras dengan penuh kemauan untuk tujuan kelompok). Dari pendapat Terry dapat diartikan bahwa kepemimpinan itu adalah merupakan kemampuan untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan. Menurut Dubin dalam Wahjosumidjo (1994:21) “Leadership is the exercises of authority and the making of decisions” (Kepemimpinan adalah aktivitas para pemegang kekuasaan dan membuat keputusan). Dari pendapat Dubin dapat diartikan bahwa kepemimpinan itu adalah merupakan aktivitas yang dilakukan oleh para pemegang kekuasaan dalam membuat suatu keputusan.

Selanjutnya menurut Stogdill dalam Stonner (2003:161) Kepemimpinan adalah suatu proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan dan anggota kelompok. Dari pendapat Stogdill dapat ditarik suatu pendapat bahwa kepemimpinan itu merupakan upaya dalam mempengaruhi dan mengarahkan suatu kelompok. Sehingga menurut Sutikno (2014:26) Kepemimpinan dalam organisasi diarahkan untuk mempengaruhi orang-orang yang dipimpinnya, agar mau berbuat seperti yang diharapkan ataupun diarahkan oleh orang lain yang memimpinya.

Margono Slamet (1999:1) tugas pimpinan tidak hanya memberi perintah, tetapi mendorong dan memfasilitasi perbaikan mutu pekerjaan yang dilakukan oleh anggota atau bawahan. Selanjutnya menurut Edward Deming dalam Margono Slamet (1999:1) adalah melembagakan kepemimpinan yang membantu setiap orang dalam organisasi untuk dapat melakukan pekerjaan dengan baik melalui kegiatan-kegiatan pembinaan, memfasilitasi, membantu mengatasi kendala, dan lain sebagainya. Upaya suatu organisasi untuk meningkatkan mutu kinerjanya memerlukan adanya kepemimpinan yang selalu memotivasi anggota- anggota lain dari organisasi itu untuk selalu memperbaiki mutu kerjanya. Berdasarkan definisi kepemimpinan di atas dapat diartikan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan seseorang dalam mempengaruhi, menggerakkan, mendorong, mengendalikan orang lain atau bawahannya untuk melakukan sesuatu pekerjaan atas kesadarannya dan berkontribusi dalam mencapai suatu tujuan.

Setelah menguraikan pengertian tentang kepemimpinan, selanjutnya menjelaskan definisi gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan merupakan aspek penting untuk mencapai dan meningkatkan keberhasilan kepemimpinan seseorang dalam suatu organisasi. Menurut Thoha (2013:49) bahwa Gaya Kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain seperti yang ia lihat.

Sedangkan Rivai (2014:16) menyatakan Gaya Kepemimpinan adalah sekumpulan ciri yang digunakan pimpinan untuk memengaruhi bawahan agar

sasaran organisasi tercapai atau dapat pula dikatakan bahwa gaya kepemimpinan adalah pola perilaku dan strategi yang disukai dan sering diterapkan oleh seorang pemimpin. Gaya kepemimpinan yang menunjukkan, secara langsung maupun tidak langsung, tentang keyakinan seorang pimpinan terhadap kemampuan bawahannya. Artinya gaya kepemimpinan adalah perilaku dan strategi, sebagai hasil kombinasi dari falsafah, keterampilan, sifat, sikap, yang sering diterapkan seorang pemimpin ketika ia mencoba memengaruhi kinerja bawahannya. Selanjutnya menurut Stonner (1996:165) menyatakan bahwa gaya kepemimpinan adalah berbagai pola tingkah laku yang disukai oleh pemimpin dalam proses mengarahkan dan mempengaruhi pekerja. Berdasarkan pengertian dari para ahli di atas, maka disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan adalah salah satu cara yang dipergunakan oleh seorang pemimpin dalam mempengaruhi, mengarahkan dan mengendalikan perilaku orang lain untuk mencapai suatu tujuan.

2.2.2 Macam - Macam Gaya Kepemimpinan

Sepanjang diketahui sekarang ini, para pemimpin dalam berbagai bentuk organisasi dapat digolongkan kepada lima golongan (gaya) pemimpin. Menurut Sondang P. Siagian (dalam Irham Fahmi 2016:126).

Gaya itu ialah:

1. Gaya pemimpin yang otokratis,

Seorang pemimpin yang otokratis ialah seorang pemimpin yang :

- a. Menganggap organisasi adalah milik pribadi;
- b. Mengidentikkan tujuan pribadi dan tujuan organisasi;

- c. Menganggap bawahan sebagai alat semata-mata;
- d. Tidak mau menerima kritik, saran dan pendapat;
- e. Terlalu bergantung pada kekuasaan formalnya;
- f. Dalam tindakan penggerakannya sering mempergunakan approach yang mengandung unsur paksaan dan punitif (bersifat menghukum). Dari sifat-sifat tersebut diatas jelas terlihat bahwa tipe pemimpin yang demikian tidak tepat untuk suatu organisasi modern dimana hak-hak asasi manusia yang menjadi bawahan itu harus dihormati

2. Gaya militeristis

Perlu diperhatikan terlebih dahulu bahwa yang dimaksud dengan seorang pemimpin tipe militeristis berbeda dengan seorang pemimpin organisasi militer. Seorang pemimpin yang bertipe militeristis ialah seorang yang memiliki sifat-sifat:

- a. Dalam menggerakkan bawahan sistem perintah yang lebih sering dipergunakan;
- b. Bawahan senang bergantung kepada pangkat dan jabatannya;
- c. Senang kepada formalitas yang berlebih-lebihan;
- d. Menuntut disiplin yang tinggi dan kaku dari bawahan;
- e. Sukur menerima kritikan dari bawahannya;
- f. Menggemari upacara-upacara untuk berbagai keadaan.

Terlihat pula dari sifat-sifat tersebut bahwa seorang pemimpin yang militeris bukanlah seorang pemimpin yang ideal.

3. Gaya paternalistis

Seorang pemimpin yang tergolong sebagai pemimpin yang paternalistis ialah seorang yang:

- a. Menganggap bawahannya sebagai manusia yang tidak dewasa;
- b. Bersifat terlalu melindungi (overly protective)
- c. Jarang memberikan kesempatan pada bawahannya untuk mengambil keputusan;
- d. Jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil inisiatif;
- e. Jarang memberikan kesempatan pada bawahannya untuk mengembangkan daya kreasi dan fantasinya;
- f. Sering bersikap maha tau

Harus diakui bahwa untuk keadaan tertentu, seorang pemimpin yang demikian sangat diperlukan, akan tetapi sifat-sifatnya yang negatif mengalahkan sifat-sifatnya yang positif.

4. Gaya karismatis

Hingga sekarang ini para sarjana belum berhasil menemukan sebab-sebab mengapa seorang pemimpin memiliki karisma, yang diketahui ialah bahwa pemimpin yang demikian mempunyai daya penarik yang amat besar dan karenanya pada umumnya menjadi pengikut pemimpin itu. Karena kurangnya pengetahuan tentang sebab-musabab seorang menjadi pemimpin yang karismatis, maka sering hanya dikatakan bahwa pemimpin yang demikian diberkahi dengan kekuatan gaib (supernatural

power). Kekayaan, umur, kesehatan, profil tidak dapat dipergunakan sebagai kriteria untuk karisma. Gandhi bukanlah seorang yang kaya. Iskandar Zulkarain bukanlah seorang yang fisik seha. John F. Kendy adalah seorang pemimpinyang memiliki karisma, meskipun umurnyamasih muda pada waktu terpilih menjadi presiden Amerika Serikat. Mengenai profil, Gandhi tidak dapat digolongkan sebagai orang yang “ganteng”

5. Gaya demokratis

Pengetahuan tentang kepemimpinan telah membuktikan bahwa tipe pemimpin yang demokratislah yang paling tepat untuk oragnisasi modern karena:

- a. Dalam proses penggerakan bawahan selalu berkritik tolak dari pendapat bahwa manusia itu adalah mahluk yang mulia di dunia;
- b. Selalu berusaha mensinkronisasikan kepentingan dan tujuan organisasi dengan kepentingan dan tujuan pribadi dari para bawahannya;
- c. Ia senang menerima saran, pendapat bahkan kritik dari bawahannya;
- d. Selalu berusaha mengutamakan kerja sama dan teamwork dalam usaha mencapai tujuan;
- e. Selalu berusaha untuk menjadikan bawahannya lebih sukses daripadanya.

- f. Berusaha mengembangkan kapasitas diri pribadinya sebagai pemimpin.

Secara implis tergambar bahwa untuk menjadi pemimpin tipe demokrasi bukanlah suatu hal yang mudah untuk dicapai. Akan tetapi karena pemimpin yang demikianlah yang paling ideal, alangkah baiknya jika semua berusaha menjadi seorang pemimpin yang demokratis.

2.2.3 Timbulnya Seorang Pemimpin

Mengenai Timbulnya Seorang Pemimpin Oleh para ahli teori kepemimpinan telah dikemukakan beberapa teori yang berbeda-beda namun demikian, apabila berbagai teori itu dianalisa, akan terlihat adanya tiga teori yang menonjol. Ketiga teori itu adalah:

- a. Teori Genetis

Inti daripada ajaran teori ini tersimpul dalam sebutan dalam yang mengatakan bahwa “leaders are born and not made”. Berarti bahwa para penganut teori ini mentegahkan pendapat yang mengatakan bahwa seorang pemimpin akan menjadi pemimpin karena ia telah dilahirkan bakat-bakat kepemimpinan. Dalam keadaan bagaimanapun seseorang ditempatkan, karena ia telah ditakdirkan menjadi pemimpin. Berbicara mengenai takdir, secara filosofi pandangan ini tergolong kepada pandangan yang fatalistis atau deterministis.

- b. Teori social

Jika teori pertama diatas adalah satu ekstrim, maka teori inipun merupakan esktrim pada ujung lain olarisasi dari dekstrim ini. Inti ajaran teori social ini ialah bahwa “leaders are made and not born”. Merupakan kebalikan inti dari genetis. Para penganut teori ini mengetengahkan pendapat yang mengatakan bahwa setiap orang biasa menjadi pemimpin apabila diberikan pendidikan dan pengalaman yang cukup.

c. Teori Ekologis

Karena kedua teori esktrimtidak seluruhnya mengandung kebenaran, maka sebagai reaksi kepada kedua teori tersebut timbullah muncullah teori ketiga yang disebut teori ekologis yang pada intinya berarti bahwa seorang akan berhasil menjadi pemimpin yang baik apabilaia pada waktunya lahirnya telah memiliki bakat-bakat pemimpin, bakat-bakat kemudian di kembangkan melalui pendidikan yang teratur dan pengalaman yang memungkinkannya untuk mengembangkan lebih lanjut bakat-bakat yang memang telah dimiliki itu.

Teori ini mengabungkan segi-segi positif dari kedua teori terahulu dan karenanya dapat dikatakan merupakan teori yang paling mendekati kebenaran namun demikian, penyeledikan secara jauh lebih mendalam masih diperlukan untuk dapat mengatakan secara pasti.

Menurut Ronald Lippitt dan Ralph K. White dalam Sutarto (2012:60) mengemukakan pendapat tentang macam-macam gaya kepemimpinan, sebagai berikut:

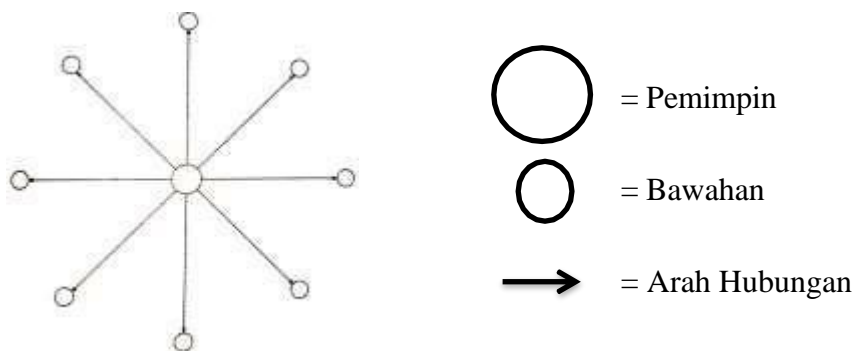
1. Kepemimpinan Gaya Otoriter

Kepemimpinan gaya otoriter, otokratis, atau diktator adalah kemampuan mempengaruhi orang lain agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan cara segala kegiatan yang akan dilakukan oleh pemimpin semata-mata. Kepemimpinan gaya otoriter antara lain berciri:

- 1) Wewenang mutlak terpusat pada pemimpin
- 2) Keputusan selalu dibuat oleh pemimpin
- 3) Kebijakan selalu dibuat oleh pemimpin
- 4) Komunikasi berlangsung satu arah dari pemimpin kepada bawahan
- 5) Pengawasan terhadap sikap, tingkah laku, perbuatan, atau kegiatan para bawahannya dilakukan secara ketat
- 6) Prakarsa harus selalu datang dari pemimpin
- 7) Tiada kesempatan bagi bawahan untuk memberikan saran, pertimbangan, atau pendapat
- 8) Tugas-tugas bagi bawahan diberikan secara instruktif
- 9) Lebih banyak kritik daripada pujian
- 10) Pemimpin menuntut prestasi sempurna dari bawahan tanpa syarat
- 11) Pemimpin menuntut kesetiaan mutlak tanpa syarat
- 12) Cenderung adanya paksaan, ancaman, dan hukuman
- 13) Kasar dalam bertindak
- 14) Kaku dalam bersikap

Oleh Lewis B. Sappington dan C.G. Brown dalam Sutarto (2012:16)

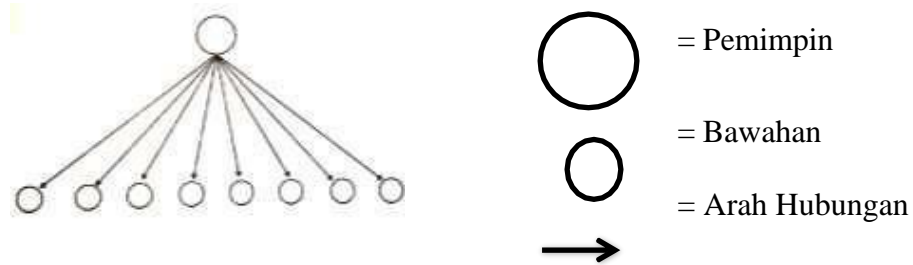
kepemimpinan gaya otoriter ditunjukkan dengan gambar sebagai berikut:



Gambar 2.1 Gaya Kepemimpinan Otoriter

Sumber: Dasar-Dasar Kepemimpinan Administrasi, Sutarto (2012)

Apabila ditunjukkan dalam struktur organisasi, kepemimpinan gaya otoriter akan nampak sebagai bagan di bawah ini:



Gambar 2.2 Gaya Kepemimpinan Otoriter

Sumber: Dasar-Dasar Kepemimpinan Administrasi, Sutarto (2012)

Penerapan kepemimpinan gaya otoriter dapat mendatangkan keuntungan antara lain berubah kecepatan, serta ketegasan dalam pembuatan keputusan dan bertindak sehingga untuk sementara mungkin produktifitas dapat naik. Tetapi penerapan kepemimpinan gaya otoriter dapat menimbulkan kerugian antara lain berupa suasana kaku, tegang, mencekam, menakutkan sehingga dapat berakibat lebih lanjut timbulnya ketidakpuasan. Dalam hal ini Agarawal berpendapat bahwa “penerapan kepemimpinan gaya otoriter ternyata mengakibatkan merusak moral, meniadakan inisiatif, menimbulkan permusuhan, agresivitas, keluhan, absen, pindah, dan tidak puas”.

Kepemimpinan gaya otoriter hanya tepat diterapkan dalam organisasi yang sedang menghadapi keadaan darurat karena sendi-sendi kelangsungan hidup organisasi terancam, apabila keadaan darurat telah selesai gaya ini harus segera ditinggalkan.

2. Kepemimpinan Gaya Demokratis

Kepemimpinan gaya demokratis adalah kemampuan mempengaruhi

orang lain agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara berbagai kegiatan yang akan dilakukan ditentukan bersama antara pemimpin dan bawahan. Kepemimpinan gaya demokratis antara lain berciri:

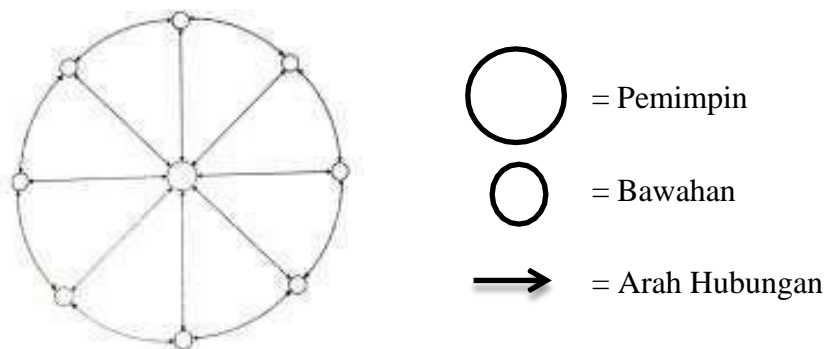
- 1) Wewenang pimpinan tidak mutlak
- 2) Pimpinan bersedia melimpahkan sebagian wewenang kepada bawahan
- 3) Keputusan dibuat bersama antara pimpinan dan bawahan
- 4) Kebijakan dibuat bersama antara pimpinan dan bawahan
- 5) Komunikasi berlangsung timbal-balik, baik yang terjadi antara pimpinan dan bawahan maupun antara sesama bawahan
- 6) Pengawasan terhadap sikap, tingkah laku, perbuatan atau kegiatan para bawahan dilakukan secara wajar
- 7) Prakarsa dapat datang dari pimpinan maupun bawahan
- 8) Banyak kesempatan bagi bawahan untuk menyampaikan saran, pertimbangan, atau pendapat
- 9) Tugas-tugas kepala bawahan diberikan dengan lebih bersifat permintaan daripada instruktif
- 10) Pujian atau kritik seimbang
- 11) Pemimpin mendorong prestasi sempurna para bawahan dalam batas kemampuan masing-masing
- 12) Pemimpin meminta kesetiaan para bawahan secara wajar
- 13) Pemimpin memperhatikan perasaan dalam bersikap dan bertindak
- 14) Terdapat suasana saling percaya, saling menghormati dan saling

menghargai

- 15) Tanggung jawab keberhasilan organisasi dipikul bersama pimpinan dan bawahan

Herbert G. Hicks dan Ray C. Gullett dalam Kartono (2012:24) menyatakan bahwa dengan kepemimpinan gaya demokratis keluaran mungkin tidak setinggi pada gaya otoriter, namun kualitas lebih baik, dan masalah saling berpendapat, semua orang dianggap sama penting dalam menyumbangkan ide dalam pembuatan keputusan. Sharma dalam Kartono (2012:86) memberikan pandangan yang senada juga mengenai gaya demokratis, yaitu dalam gaya demokratis pemimpin memerhatikan pandangan bawahan, memberikan bimbingan pada masalah-masalah yang timbul, dan melibatkan perasaan sendiri dalam membantu bawahan mencapai tujuan organisasi sebaik tujuan individu.

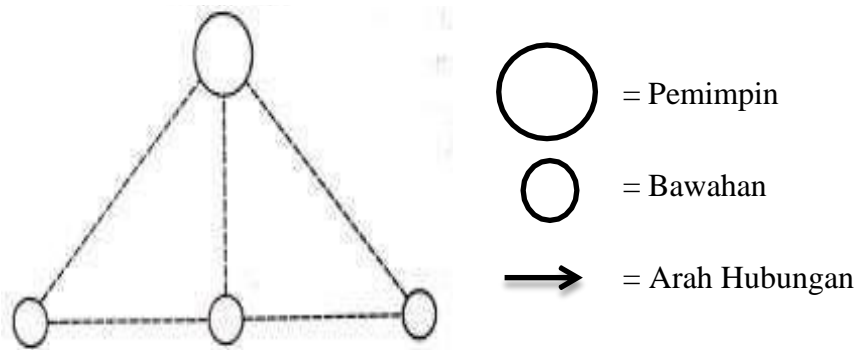
Oleh Lewis B. Sappington dan C.G. Brown dalam Kartono (2012:18) kepemimpinan gaya demokratis ditunjukkan dengan gambar sebagai berikut:



Gambar 2.3 Gaya Kepemimpinan Otoriter
Sumber: Dasar-Dasar Kepemimpinan Administrasi, Sutarto (2012)

Apabila ditunjukkan dalam struktur organisasi, kepemimpinan gaya

demokratis akan nampak sebagai bagan dibawah ini:



Gambar 2.4 Gaya Kepemimpinan Otoriter
Sumber: Dasar-Dasar Kepemimpinan Administrasi, Sutarto (2012)

Penerapan kepemimpinan gaya demokratis dapat mendatangkan keuntungan antara lain berupa keputusan serta tindakan yang lebih obyektif, tumbuhnya rasa ikut memiliki, serta terbinanya moral yang tinggi. Sedang kelemahan gaya ini antara lain keputusan serta tindakan kadang-kadang lamban, rasa tanggung jawab kurang.

3. Kepemimpinan Gaya Liberal

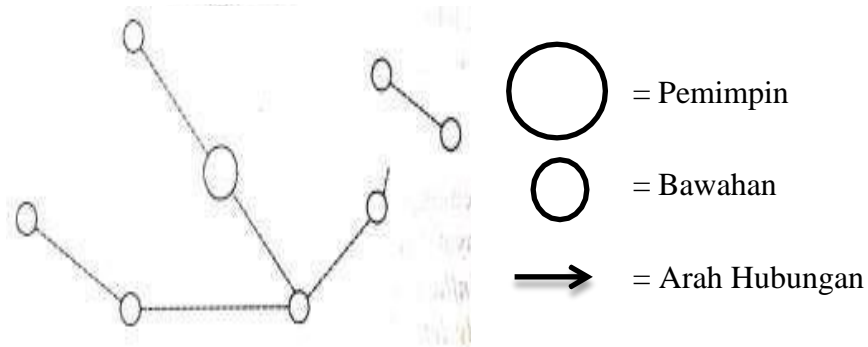
Kepemimpinan gaya kebebasan atau gaya liberal adalah kemampuan mempengaruhi orang lain agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara berbagai kegiatan yang akan dilakukan lebih banyak diserahkan kepada bawahan. Kepemimpinan liberal antara lain berciri:

- 1) Pimpinan melimpahkan wewenang sepenuhnya kepada bawahan
- 2) Keputusan lebih banyak dibuat oleh para bawahan
- 3) Kebijakan lebih banyak dibuat oleh para bawahan
- 4) Pimpinan hanya berkomunikasi apabila diperlukan oleh bawahannya
- 5) Hampir tiada pengawasan terhadap sikap, tingkah laku, perbuatan,

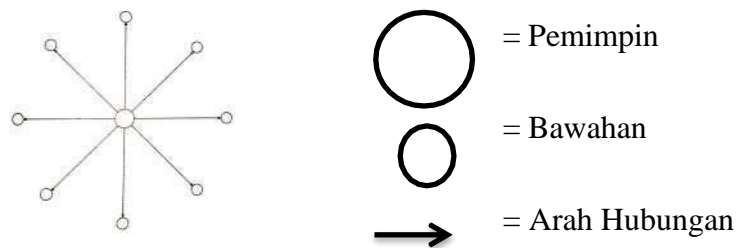
atau kegiatan yang dilakukan para bawahan.

- 6) Prakarsa selalu datang dari bawahan
- 7) Hampir tiada pengarahan dari pimpinan

Oleh Lewis B. Sappington dan C.G. Brown dalam Kartono (2012:21) kepemimpinan gaya liberal ditunjukkan dengan gambar sebagai berikut:



Gambar 2.5 Gaya Kepemimpinan Otoriter
Sumber: Dasar-Dasar Kepemimpinan Administrasi, Sutarto (2012)



Gambar 2.6 Gaya Kepemimpinan Otoriter
Sumber: Dasar-Dasar Kepemimpinan Administrasi, Sutarto (2012)

Penerapan pemimpin gaya liberal dapat mendatangkan keuntungan antara lain para anggota atau bawahan akan dapat mengembangkan kemampuan dirinya. Tetapi kepemimpinan jenis ini membawa kerugian bagi organisasi antara lain berupa kekacauan karena setiap pejabat bekerja menurut selera masing-masing.

- a) Gaya kepemimpinan menurut pendapat Hasibuan (2007:170) Gaya Kepemimpinan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Kepemimpinan Otoriter adalah jika kekuasaan atau wewenang, sebagian besar mutlak tetap berada pada pimpinan atau kalau pimpinan itu menganut sistem sentralisasi wewenang. Pengambilan keputusan dan kebijaksanaan hanya ditetapkan sendiri oleh pemimpin, bawahan tidak diikutsertakan untuk memberikan saran, ide, dan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Orientasi kepemimpinannya difokuskan hanya untuk peningkatan produktivitas kerja karyawan dengan kurang memperhatikan perasaan dan kesejahteraan bawahan.
2. Kepemimpinan Partisipatif adalah apabila dalam kepemimpinannya dilakukan dengan cara persuasif, menciptakan kerja sama yang serasi, menumbuhkan loyalitas, dan partisipasi para bawahan. Pemimpin memotivasi bawahan agar merasa ikutmemiliki perusahaan. Bawahan harus berpartisipasi memberikan saran, ide, dan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Pemimpin dengan gaya partisipatif akan mendorong kemampuan bawahan mengambil keputusan. Dengan demikian, pimpinan akan selalu membina bawahan untuk menerima tanggung jawab yang lebih besar.
3. Kepemimpinan Delekatif apabila seorang pemimpin mendelegasikan wewenangnya kepada bawahan dengan agak lengkap. Dengan demikian, bawahan dapat mengambil keputusan dan kebijaksanaan dengan bebas atau leluasa dalam melaksanakan

pekerjaannya. Pemimpin tidak peduli cara bawahan mengambil keputusan dan mengerjakan pekerjaannya, sepenuhnya diserahkan kepada bawahan. Pada prinsipnya pemimpin bersikap menyerahkan dan mengatakan kepada bawahan inilah pekerjaan yang harus saudara kerjakan, saya tidak peduli, terserah saudara bagaimana mengerjakannya asal pekerjaan tersebut bisa diselesaikan dengan baik. Dalam hal ini bawahan dituntut memiliki kematangan dalam pekerjaan (kemampuan) dan kematangan psikologis (kemauan). Kematangan pekerjaan dikaitkan dengan kemampuan untuk melakukan sesuatu yang berdasarkan pengetahuan dan keterampilan. Kematangan psikologis dikaitkan dengan kemauan atau motivasi untuk melakukan sesuatu yang erat kaitannya dengan rasa yakin dan keterikatan.

b) Gaya kepemimpinan menurut Sutikno (2014:35) mengatakan gaya kepemimpinan atau perilaku kepemimpinan atau sering disebut Tipe Kepemimpinan. Tipe kepemimpinan yang luas dikenal dan diakui keberadaannya adalah sebagai berikut:

1. Tipe Otokratik, tipe kepemimpinan ini menganggap bahwa kepemimpinan adalah hak pribadinya (pemimpin), sehingga ia tidak perlu berkonsultasi dengan orang lain dan tidak boleh ada orang lain yang turut campur. Seorang pemimpin yang tergolong otokratik memiliki serangkaian karakteristik yang biasanya

dipandang sebagai karakteristik yang negatif. Seorang pemimpin otokratik adalah seorang yang egois. Seorang pemimpin otokratik akan menunjukkan sikap yang menonjolkan keakuannya, dan selalu mengabaikan peranan bawahan dalam proses pengambilan keputusan, tidak mau menerima saran dan pandangan bawahannya.

2. Tipe Kendali Bebas atau Masa Bodo (*Laissez Faire*), tipe kepemimpinan ini merupakan kebalikan dari tipe kepemimpinan otokratik. Dalam kepemimpinan tipe ini sang pemimpin biasanya menunjukkan perilaku yang pasif dan seringkali menghindar diri dari tanggung jawab. Seorang pemimpin yang kendali bebas cenderung memilih peran yang pasif dan membiarkan organisasi berjalan menurut temponya sendiri. Disini seorang pemimpin mempunyai keyakinan bebas dengan memberikan kebebasan yang seluas-luasnya terhadap bawahan maka semua usahanya akan cepat berhasil.
3. Tipe Paternalistik, persepsi seorang pemimpin yang paternalistik tentang peranannya dalam kehidupan organisasi dapat dikatakan diwarnai oleh harapan bawahan kepadanya. Harapan bawahan berwujud keinginan agar pemimpin mampu berperan sebagai bapak yang bersifat melindungi dan layak dijadikan sebagai tempat bertanya dan untuk memperoleh petunjuk, memberikan perhatian terhadap kepentingan dan kesejahteraan bawahannya.

Pemimpin yang paternalistik mengharapkan agar legitimasi kepemimpinannya merupakan penerimaan atas peranannya yang dominan dalam kehidupan organisasi.

4. Tipe Kharismatik, seorang pemimpin yang kharismatik memiliki karakteristik khusus yaitu daya tariknya yang sangat memikat, sehingga mampu memperoleh pengikut yang sangat besar dan para pengikutnya tidak selalu dapat menjelaskan secara konkrit mengapa orang tersebut itu dikagumi. Hingga sekarang, para ahli belum berhasil menemukan sebab-sebab mengapa seorang pemimpin memiliki kharisma. Yang diketahui ialah bahwa pemimpin yang demikian mempunyai daya penarik yang amat besar.
5. Tipe Militeristik, pemimpin tipe militeristik berbeda dengan seorang pemimpin organisasi militer. Pemimpin yang bertipe militeristik ialah pemimpin dalam menggerakkan bawahannya lebih sering mempergunakan sistem perintah, senang bergantung kepada pangkat dan jabatannya, dan senang kepada formalitas yang berlebih-lebihan. Menuntut disiplin yang tinggi dan kaku dari bawahannya, dan sukar menerima kritikan dari bawahannya.
6. Tipe Pseudo-demokratik, tipe ini disebut juga kepemimpinan manipulatif atau semi demokratik. Tipe kepemimpinan ini ditandai oleh adanya sikap seorang pemimpin yang berusaha mengemukakan keinginan-keinginannya dan setelah itu membuat

sebuah panitia, dengan berpura-pura untuk berunding tetapi yang sebenarnya tiada lain untuk mengesahkan saran-sarannya. Pemimpin seperti ini menjadikan demokrasi sebagai selubung untuk memperoleh kemenangan tertentu. Pemimpin yang bertipe pseudo-demokratik hanya tampaknya saja bersikap demokratis padahal sebenarnya dia bersikap otoriter. Pemimpin ini menganut demokrasi semu dan lebih mengarah kepada kegiatan pemimpin yang otoriter dalam bentuk yang halus, samar-samar.

7. Tipe Demokratik, tipe demokratik adalah tipe pemimpin yang demokratis dan bukan kerana dipilihnya sipemimpin secara demokratis. Tipe kepemimpinan dimana pemimpin selalu bersedia menerima dan menghargai saran-saran, pendapat, dan nasehat dari staf dan bawahan, melalui forum musyawarah untuk mencapai kata sepakat. Kepemimpinan demokratik adalah kepemimpinan yang aktif, dinamis, dan terarah. Kegiatan-kegiatan pengendalian dilaksanakan secara tertib dan bertanggung jawab. Pembagian tugas disertai pelimpahan wewenang dan tanggung jawab yang jelas, memungkinkan setiap anggota berpartisipasi secara aktif.

Berdasarkan penjelasan mengenai kepemimpinan, peneliti mengambil fokus terhadap teori Ronald Lippitt dan Ralph K. White dalam Sutarto (2012). Hal tersebut dikarenakan menurut Mulyadi dan Rivai (2009:2) memaparkan bahwa pemimpin dalam kepemimpinannya perlu memikirkan

dan memperlihatkan gaya kepemimpinan yang akan diterapkan kepada pegawainya. Gaya kepemimpinan yaitu norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain. Gaya kepemimpinan atasan dapat mempengaruhi kesuksesan pegawai dalam berprestasi.

Kepemimpinan adalah hubungan dimana satu orang yakni pimpinan mempengaruhi pihak lain untuk bekerja sama secara suka rela dalam usaha mengerjakan tugas-tugas yang berhubungan untuk mencapai hal yang diinginkan. Setiap pemimpin memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda satu sama lain. Gaya kepemimpinan adalah suatu cara yang digunakan oleh seorang pemimpin dalam mempengaruhi perilaku orang lain. Setiap pemimpin akan menjalankan gaya kemampuan sesuai dengan kemampuan, kepribadian dan lingkungannya. Gaya kepemimpinan menurut Lippit dan White terbagi menjadi gaya kepemimpinan otokratik, demokratik dan *laissez faire*.

2.2.4 Teori Gaya Kepemimpinan

Menurut Vietzal Rivai (2008:30) dalam buku Kepemimpinan dan Prilaku Organisasi mengatakan ada beberapa teori yang mendukung dari diri seorang pemimpin, teori tersebut antara lain adalah:

Teori Sifat, merupakan teori yang menjelaskan Sifat-sifat yang melekat dalam diri seorang pemimpin yang akan mewarnai tingkah laku, perbuatan, tindakan dan keputusan-keputusan yang diambilnya. Sifat merupakan tumpuan dan modal dasar untuk memberikan energi dalam

kepemimpinannya. Pemimpin dapat mencapai efektifitas dengan mengembangkan sifat-sifat yang dimiliki.

- a) Teori Perilaku, dalam teori ini perilaku pemimpin merupakan sesuatu yang bisa dipelajari. Jadi seseorang yang dilatih dengan kepemimpinan yang tepat akan meraih keefektifan dalam memimpin. Teori ini memusatkan perhatiannya pada dua aspek perilaku kepemimpinan, yaitu: fungsi kepemimpinan, dan gaya kepemimpinan. Terdapat dua fungsi kepemimpinan, yaitu: a. Fungsi yang berorientasi tugas; b. Fungsi yang berorientasi orang atau pemeliharaan kelompok (sosial).
- b) Teori Kepemimpinan Situasional, suatu pendekatan terhadap kepemimpinan yang menyatakan bahwa pemimpin memahami perilakunya, sifat-sifat bawahannya, dan situasi sebelum menggunakan gaya kepemimpinan tertentu. Pendekatan ini mensyaratkan pemimpin untuk memiliki keterampilan diagnostik.

Model perilaku ini menarik perhatian tekanan utama dari teori ini terletak pada perilaku pemimpin dalam hubungannya dengan bawahan. Menurut Mulyasa yang dikutip oleh Nur Efendi (2015:158), perilaku kepemimpinan ada tiga dimensi, yang didasarkan pada hubungan antara tiga faktor, yaitu perilaku tugas (*Task behavior*), perilaku hubungan (*relationship behavior*) dan kematangan (*maturity*). Perilaku tugas merupakan pemberian petunjuk oleh pemimpin terhadap anak buah meliputi penjelasan tertentu, apa yang harus dikerjakan, bilamana, dan bagaimana

mengerjakannya, serta mengawasi mereka secara ketat. Perilaku hubungan merupakan ajakan yang disampaikan oleh pemimpin melalui komunikasi dua arah yang meliputi mendengar dan melibatkan anak buah dalam pemecahan masalah. Adapun kematangan adalah kemampuan dan kemauan anak buah dalam mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya. Dari ketiga faktor tersebut, tingkat kematangan anak buah merupakan faktor yang paling dominan.

Kegiatan pemimpin dalam melakukan manajemen organisasinya mulai dari pengambilan keputusan sampai pada pelaksanaan dan evaluasi kerja menunjukkan suatu perilaku. Perilaku pemimpin dalam suatu organisasi menjadi sorotan dan memengaruhi timbulnya perilaku anggota atau perilaku kelompok. Apabila perilaku pemimpin, baik dalam memberikan instruksi, mengawasi, maupun melakukan evaluasi, termasuk dalam mengemukakan pikiran-pikirannya maka dapat menciptakan efektivitas organisasi.

Menurut Andang (2014:159) Perilaku kepemimpinan tersebut, yaitu perilaku instruktif, konsultatif, partisipatif, dan delegatif. Perilaku kepemimpinan tersebut, masing-masing memiliki ciri pokok sebagai berikut:

- a Perilaku Instruktif; terbangunnya komunikasi satu arah, pimpinan membatasi peranan bawahan, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan menjadi tanggung jawab pemimpin, pelaksanaan pekerjaan diawasi dengan ketat.

- b. Perilaku Konsultatif; pemimpin masih memberikan instruksi yang cukup besar serta menentukan keputusan, telah diharapkan komunikasi dua arah dan memberikan suportif terhadap bawahan, pemimpin mau mendengar keluhan dan perasaan bawahan dalam pengambilan keputusan, bantuan terhadap bawahan ditingkatkan tetapi pelaksanaan keputusan tetap pada pemimpin.
- c. Perilaku Partisipatif; control atas pemecahan masalah dan pengambilan keputusan antara pemimpin dan bawahan seimbang, pemimpin dan bawahan sama-sama terlibat dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, komunikasi dua arah semakin meningkat, pemimpin semakin mendengarkan secara intensif terhadap bawahannya, keikutsertaan bawahan dalam pemecahan dan pengambilan keputusan makin bertambah.
- d. Perilaku Delegatif; pemimpin mendiskusikan masalah yang dihadapi dengan bawahan dan selanjutnya mendelegasikan pengambilan keputusan seluruhnya kepada bawahan, bawahan diberi hak untuk menentukan langkah-langkah bagaimana keputusan dilaksanakan, dan bawahan diberi wewenang untuk menyelesaikan tugas-tugas sesuai dengan keputusan sendiri.

Seorang pemimpin dalam melakukan tugas kepemimpinannya dengan menggunakan gaya dan tipe kepemimpinan tertentu mempunyai karakteristik tersendiri. Seorang pemimpin mempunyai sifat, kebiasaan, tempramen, watak, dan kebiasaan sendiri yang khas sehingga dengan

tingkah laku dan gayanya sendiri membedakan dirinya dengan orang lain. Tipe kepemimpinannya tersebut pasti akan mewarnai perilaku kepemimpinan.

2.3 Kepemimpinan Kepala Desa

Kepala Desa adalah pemimpin yang dipilih secara demokrasi maupun secara tradisional oleh warga yang mana ia adalah wakil perpanjangan tangan dari masyarakat untuk dapat mengatur, menjaga dan memotivasi warganya dalam proses pembangunan di desa. Kepemimpinan Kepala Desa sangatlah berpengaruh terhadap maju-mundurnya dan berkembang atau tidak berkembangnya suatu pembangunan di desa yang dapat dilihat dari gaya kepemimpinan kepala desa tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Pasal 26-30 dikatakan bahwa bentuk pemerintahan desa terdiri atas pemerintah desa dan perwakilan desa. Pemerintah terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 Peraturan Pemerintah tersebut dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat. Penyelenggaraan pemerintah desa dilakukan oleh pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa. Masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun, dihitung sejak yang bersangkutan dilantik.

Kepala desa yang sudah menduduki jabatan hanya boleh untuk dua kali masa jabatan. Seorang kepala desa hanya boleh menjabat selama dua kali masa jabatan. Pada pelaksanaan tugas dan wewenangnya, kepala desa dibantu oleh

perangkat desa yang bertanggung jawab kepada kepala desa.

2.4 Konsep Penyelenggaraan Pemerintah

Desentralisasi dalam Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI.

Menurut Panglima Siragih, terdapat perbedaan terhadap desentralisasi dan otonomi daerah. Karena dalam desentralisasi harus ada pendistribusian wewenang atau kekuasaan dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah, sedangkan otonomi daerah berarti adanya kebebasan menjalankan atau melaksanakan sesuatu oleh suatu unit politik atau bagian wilayah/teritori dalam kaitannya dengan masyarakat politik atau negara. Dengan desentralisasi maka akan berkurangnya sebagian atau seluruh wewenang pusat karena diserahkan ke daerah, sedangkan daerah yang menerima penyerahan itu bersifat otonom yaitu dapat menentukan caranya sendiri berdasarkan prakarsa sendiri secara bebas.

2.5 Pemerintah Desa

Berbicara tentang Pemerintahan Desa, tentu tidak lepas dari keberadaan undang-undang yang mengaturnya serta paradigma yang melatar belakanginya. Dari undang-undang dan paradigma tersebut, dapat dilihat bagaimana tata pemerintahan desa di set-up. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Menurut

Prijono & Yumiko (1994: 20) paradigma biasa dikategorikan sebagai bingkai *atau framework atau rule of the game* yang akan menjadi acuan suatu organisasi menuju masa depan yang di inginkan. Paradigma merupakan landasan untuk mewujudkan suatu visi yaitu gambaran keberhasilan yang akan dicapai suatu organisasi dimasa depan.

Menurut Surbakti (2008:94) Rezim Orde Baru menggunakan paradigma kekuasaan yang “satu, terpusat dan seragam” dalam tiga wujud. Pertama, sentralisasi kekuasaan pada Pusat, Eksekutif dan Presiden yang merupakan prakondisi bagi stabilitas politik. Stabilitas merupakan *condition qua non* bagi kesuksesan pembangunan. Kedua, pembentukan budaya nasional sebagai pengganti budaya lokal yang merupakan prakondisi bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga, sentralisasi redistribusi kekayaan nasional untuk menjamin pemerataan dan keadilan.

Dalam sistem administrasi pemerintahan dan pembangunan yang sentralistik, dan top-down, menjadikan desa sebagai ujung tombak dan obyek program, dan proyek nasional yang sektoral yang dirancang oleh birokrasi terpusat. Artinya dalam hal implementasi kebijakan, program dan proyek Departemen dan Lembaga Non Departemen (LND) pada ujung pelaksanaannya ada di tingkat desa. Dengan begitu program dan proyek pemerintah pusat dilaksanakan di desa. Ciri pokok dari pola hubungan yang hirarkis sentralistik dan top down pada umumnya berimplikasi dipakainya pola hubungan keagenan. Menurut Kavanagh dalam Sarundajang (2005:53), ada dua model utama dalam hubungan pemerintah pusat-daerah yakni *agency model* dan *partnership model*.

Ciri pokok model pelaksana (*agency model*) adalah “*central government has the power to create or abolish local government bodies and their powers. In this model, the national framework of a policy is established centrally and local authorities, with little scope discretion or variation*”. Kaitannya pemerintah desa dengan supra desa, maka ciri *agency model* yang menonjol adalah pemerintah desa, hanya berkewajiban melaksanakan kebijakan yang dibuat secara terpusat dengan diskresi yang sangat kecil dengan tanpa hak untuk berbeda. Implikasinya pemerintahdesa hanya berkedudukan sebagai obyek yang bergantung kepada pejabat birokrasi yang terpusat (supra desa). Implikasi pola keagenan yaitu menjadikan pemerintah desa bergantung kepada birokrasi pemerintah yang terpusat yang memiliki absorsi sumberdaya yang banyak.

Implikasi pola pola hubungan keagenan dalam sistem hirarkis sentralistis dalam pelayanan publik dan pola top down dalam hal pembinaan masyarakat dan dalam perencanaan pembangunan pada Era Orde Baru, pemerintah desa menerima beban berat yakni dituntut bisa melaksanakan program dan proyek yang datang dari supra desa. Realitas tersebut, menjadikan hubungan pemerintah pusat dengan pemerintahan desa ibarat piramida terbalik. Keseragaman dalam administrasi pemerintahan desa, baik tentang struktur organisasinya, administrasi perkantoran dan manajemen keuangannya yang berimplikasi tergerusnya nilai-nilai tradisional yang hidup dimasing-masing desa, seperti kegotong-royongan, kekerabatan dan permusyawaratan. Musyawarah adalah tradisi yang hidup dalam masyarakat nusantara dalam proses pengambilan keputusan. Di introduksinya model pengambilan keputusan dalam suatu pranata yang seragam, mengakibatkan

memudarnya nilai-nilai tradisional dalam bermusyawarah mengambil keputusan.

Desa merupakan garda depan dalam perspektif pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik dan kemasyarakatan. Artinya dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia, keberadaan pemerintahan desa, merupakan ujung tombak dari pelaksanaan sistem administrasi pemerintahan, administrasi pembangunan dan administrasi kemasyarakatan. Dari segi kesejarahannya, di Indonesia menurut Suryaningrat (1976:13) telah ada satuan-satuan masyarakat kecil yang menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri yang disebut hak otonomi atau otonomi menurut hukum adat. Karena itu menurut Sumardjan (1992:54) Desa tumbuh menjadi wadah kesadaran dan kesatuan pemerintahan yang dijiwai oleh adat yang kuat, mampu menjadikan dirinya sebagai “*dorps republiek*” yang berdasarkan adat penuh berkuasa dibidang legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Terkait dengan perkembangan dan praktek penyelenggaraan pemerintahan desa yang otonom itulah, seringkali menjadi acuan, bahwa kita memiliki model demokrasi asli. Sebutan lain desa di Indonesia yakni desa (Jawa) dan negari, dusun, marga (luar Jawa). Setelah dasa warsa 1960-an dengan dicabutnya Undang-Undang No. 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja, kemudian diganti dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, sistem pemerintahan desa mengalami perubahan substansial sebagai masa memudarnya otonomi desa dan demokrasi tradisional dengan mengetatnya kontrol pemerintah pusat (*supra desa*) atas daerah pedesaan. Selanjutnya kemunduran Priyono & Yumiko (1994:2) Menguatnya intervensi dari atasan desa (*supra-village*),

menyebabkan melemahnya wewenang tradisional kepala desa (lurah) untuk Jawa, sekaligus otonomi desa dan demokrasi desa mengalami.

Memudarnya otonomi desa dan demokrasi tradisional atau adat-istiadat yang di iringi oleh makin berkembangnya tingkat pendidikan masyarakat yang dipacu oleh perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi informasi dan komunikasi, langsung maupun tidak langsung berimplikasi terhadap wawasan masyarakat mengenai demokrasi. Dalam perkembangannya mengenai wawasan demokrasi, secara ekstrim melahirkan dua kelompok yang memiliki pandangan yang berbeda sesuai dengan referensinya.

Kelompok pertama, berpandangan bahwa kita memiliki model otonomi desa dan demokrasi asli (demokrasi lokal) yang kondusif bagi pengembangan demokrasi di Era Kesejagatan ini. Pandangan ini di ilhami oleh pendapat Mohammad Hatta (1970: 83) yang mengatakan bahwa struktur demokrasi yang hidup dalam diri bangsa Indonesia harus berdasarkan pada demokrasi asli yang berlaku di desa. Kelompok kedua berpandangan, bahwa demokrasi merupakan konsep dan praktek dari negara-negara Barat (demokrasi ala barat). Perbedaan wawasan tersebut, akan berpengaruh secara signifikan terhadap sistem pemerintahan desa dan model demokrasi yang dibangun serta perilakunya dalam proses demokratisasi.

Pengertian Desa menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa “kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati”. Pemerintah desa

berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, desa dimaknai sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai pemerintah desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Undang-Undang No.23 Tahun 2014, mengakui otonomi yang dimiliki oleh pemerintah desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepada desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu.

Sebagai perwujudan demokrasi sesuai dalam ketentuan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 maka pemerintahan dalam tatanan pemerintah desa dibentuk Badan Pasmusyawaratan Desa (BPD) atau sebutan lain yang disesuaikan dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengatur dan pengontrol dalam penyelenggaraan pemerintah desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa. Lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa. Pemerintah desa adalah kepala desa beserta perangkat desa dan anggota BPD.

2.6 Tanggung Jawab Kepala Desa

Adanya pendapat dari Soelaeman (2009:11) pengertian sosiologi, desa digambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan tertentu yang mempunyai ciri-ciri, dimana mereka saling mengenal, corak kehidupan mereka relatif homogen serta banyak bergantung kepada alam, ukuran komunitasnya tidak terlalu besar, penduduknya tidak padat, adat istiadat masih dipegang dengan kuat, mobilitas sosialnya rendah, dan mempunyai kesetiakawanan yang tinggi.

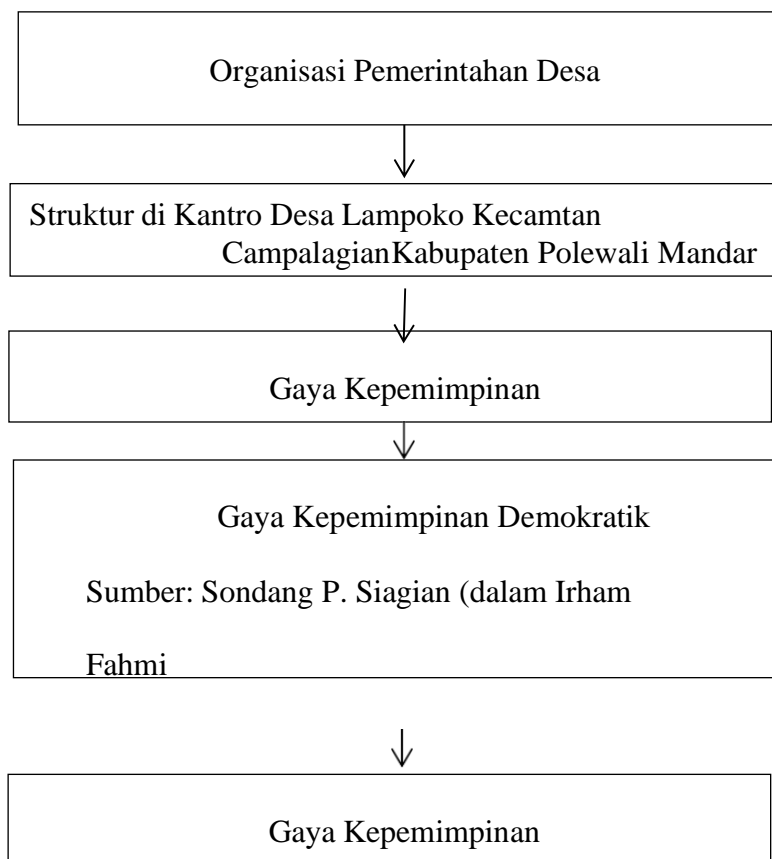
Setiap organisme pasti mempunyai kepala, kepala inilah yang berfungsi sebagai pengatur segala hal yang ada ditubuh yang dikepalainya. Lebih jauh, Ndraha (2003:212) menyatakan bahwa setiap organisme mempunyai suatu bagian yang berfungsi mengendalikan seluruh tubuh organisme itu. Bagian itu disebut kepala. Bahkan setiap benda dianggap mempunyai kepala, misalnya kepala meja, kepala tongkat dan sebagainya. Sebuah organisasi adalah juga organisme hidup. Setiap organisasi atau unit kerja juga mempunyai kepala (*head*) yang diangkat oleh kepala yang lebih formal. Untuk bisa bekerja, kepala diberi atau memperoleh kekuasaan sah (*legitimate power*) yang disebut otoritas (*authority*) melalui cara tertentu: turun temurun (tradisi), diberi (kekuasaan dipersembahkan, dilimpahkan, dipilih, ditunjuk), berbagi (*sharing*), diakui (kesaktian, kehebatan, dipuji, dikultuskan, dipercayai), atau penaklukan melalui kekerasan.

Apabila kita kaitkan dan menganggap bahwa desa adalah suatu organism, maka desa mempunyai “kepala” yang mengatur segala sesuatu. Kepala itu disebut dengan kepala desa. Isitilah kepala ini pada umumnya berkaitan dengan arti

konotasi adanya kedudukan dalam hirarki atau struktur organisasi, yang di dalamnya secara otomatis terkandung adanya fungsi, wewenang serta tanggung jawab. Dalam hubungannya kepemimpinan dengan pemerintahan maka Ndraha (2003:226) mengatakan bahwa kepemimpinan pemerintahan adalah terapan teori kepemimpinan didalam bidang pemerintahan, yang diwarnai oleh sifat-sifat khas bidang pemerintahan itu. Kepemimpinan pemerintahan menunjukkan daerah perbatasan antara gejala kepemimpinan dengan gejala pemerintahan.

2.7 Alur Pikir

Alur pikir merupakan konseptual bagaimana suatu teori berhubungan di antara berbagai faktor yang telah diidentifikasi penting terhadap masalah penelitian. Dalam alur pemikiran, peneliti harus menguraikan konsep atau variabel penelitiannya secara terperinci. Siagian menjelaskan bahwa alur berpikir atau kerangka pikir adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disintesis dari fakta-fakta observasi dan tinjauan pustaka dan landasan teori. Adapun alur pikir di bawah ini menggambarkan alur logika penelitian dan hubungan antara konsep yang diteliti.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang Kepemimpinan Demokratis (JUDUL), maka dapat disimpulkan bahwa kepala Desa Lampoko menggunakan gaya kepemimpinan demokratis. Keputusan dibuat bersama Dalam hal ini kepala desa lampoko senantiasa melakukan musyawarah untuk pengambilan keputusan dan dilakukan bersama atau melibatkan para pegawainya.

Menghargai Potensi Bawahannya merupakan sebuah hal yang sangat penting dalam sebuah organisasi, dalam hal ini dapat dilihat kepala desa lampoko sering kali memberikan apresiasi kepada bawahannya, karena hal tersebut akan memberikan dampak yang baik bagi bawahan dan bagi perkembangan sebuah organisasi. Mendengarkan kritik, saran atau pendapat dari perangkat-perangkat desanya. Menjadi seorang kepala desa tidak akan pernah lepas dari sebuah kritikan, saran dan pendapat dalam memimpin sebuah organisasi pemerintahan. Dan dalam hal ini dapat dilihat bahwa kepala kepala desa senantiasa mendengarkan, menampung berbagai kritik, saran atau pendapat yang diberikan kepadanya. Melakukan Kerjasama dengan Bawahannya Dalam hal ini kepala desa melakukan kerjasama dengan cukup baik bersama bawahannya, hal ini ditinjau dari kepala desa yang senantiasa terjun langsung kelapangan.

B. Saran

1. Diharapkan pemerintah dapat memberikan keputusan kerja, keamanan kualitas kehidupan kerja dan terutama tingkat prestasi suatu organisasi.
2. Diperlukan adanya dukungan dan melaksanakan tugas-tugas lainnya berdasar kepada peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulhak, Ishak dan Ugi Suprayogi. 2011. *Penelitian Tindakan dalam Pendidikan Nonformal*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, S. 2000. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bambang Trisantono Soemantri, 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung: Fokusmedia.
- Bungin, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Denzin, Norman K. dan Yvonna S. Lincoln (eds.). 2009. *Handbook of Qualitative Research*. Terj. Dariyatno dkk. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Drs. H. Melayu, S.P. Hasibun. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Cetakan 9 PT. Bumi Aksara.
- Haryono. 2006. *Model Pembelajaran Berbasis Peningkatan Keterampilan Proses Sains*. Jurnal Pendidikan Dasar.
- Hatta, Mohammad. 1970. *Mohammad Hatta Memoir*. Jakarta: Tinta Mas.
- Hersey, Paul dan Kenneth. H. Blanchard. 2000. *Manajemen Perilaku Organisasi: Pendayagunaan Sumber Daya Manusia, Terjemahan Agus Dharmas*. Jakarta: Erlangga.
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metodologi Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Kartono, Kartini. 2010. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: Rajawali
- Pratiwi, Agustin. 2013. *Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja*. Madura: Universitas Trunojoyo Madura.
- Prijono Tjiptoherijanto dan Yumiko M. Prijono. 1994. *Demokrasi di Pedesaan Jawa*. Jakarta: Sinar Harapan.

- Rivai, Veitzhal dan Muyadi, Deddy. 2012. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Robbins, Stephen P. 2003. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia.
- Siagian, Sondang P. 2010. *Organisasi, Kepemimpinan & Perilaku Administrasi*. Jakarta: PT Gunung Agung.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 2008. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Suryaningrat, Bayu. 1976. *Pemerintah dan Administrasi Desa*. Bandung: PT. Mekar Jaya.
- Sutarto. 2012. *Dasar-Dasar Kepemimpinan Administrasi (Edisi revisi)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sutikno, Sobry. M. 2014. *Pemimpin dan Gaya Kepemimpinan, Edisi Pertama*. Lombok: Holistica.
- Tannenbaum, R. Weschler, I. dan Massarik, F. 2013. *Leadership and Organization*. Los Angeles: Routledge.
- Thoha, Miftah. 2009. *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

1 Rujukan Online

- Eman. 2001. Gaya kepemimpinan.
<http://digilib.petra.ac.id/viewer.php?submit.x=8&submit.y=9&submit=prev&page=2&qual=high&submitval=prev&fname=%2Fjünkpe%2Fs1%2Feman%2F2001%2Fjünkpe-ns-s1-2001-31497006-694-produktivitaschapter2.Pdf> [18 Juni 2018]
- Agnesia, P. 2015. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Masih Hadapi Sejumlah Kendala.
<http://www.zonalima.com/artikel/4130/PenyelenggaraanPemerintahan-Desa-Masih-Hadapi-Sejumlah-Kendala/> [23 Juli 2018].
- Haryadi, Ahmad. 2016. Partisipasi Masyarakat Musyawarah.

<https://media.neliti.com/media/publications/149842-ID-partisipasi-masyarakat-dalam-musyawarah.pdf> [1 Juni 2018]

Situmorang, B. 2016. Desa Swakarya, Desa Swadaya dan Desa Swasembada. <http://www.kamusbesar.com/49943/desa-swadaya-swakarya-swasembada> [23 April 2018]

2 Produk Hukum

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. *Desa*. 15 Januari 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 7. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Pemerintah Daerah*. Oktober 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Jakarta.